



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN GUNUNGSINDUR

JALAN RAYA PEMBANGUNAN GUNUNGSINDUR, BOGOR  
TELEPON (021) 7560466, 7560489 FAKSIMILI (021) 7560466  
E-mail : bbpmsoh@pertanian.go.id Website : http://bbpmsoh.ditjen.pertanian.go.id

Nomor : 27011/KP.430/F.4.B/03/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)

27 Maret 2024

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan  
dan Kesehatan Hewan  
di  
Jakarta

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 28024/KP.430/F.1/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 hal Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara di Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Gunungsindur telah melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara baik berupa Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. Rekapitulasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Gunungsindur kami sertakan dalam lampiran surat ini.

Atas Perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar,  
  
Dr. Hasan Abdullah Sanyata  
NIP 197001102002121001

Obat Hewan Berkualitas, Masyarakat Aman dan Cerdas



**Lampiran Surat :**

Nomor : 11011/KP.430/F.4.B/03/2024  
Sifat : Biasa  
Tanggal : 27 Maret 2024  
Hal : Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)

**REKAPITULASI PENYAMPAIAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)  
TAHUN 2023**

**Unit Kerja : Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan**

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah seluruh Aparatur Negara	64
	a. Wajib LHKPN	6
	b. Tidak Wajib LHKPN	58
2	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	6
3	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	-
4	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT	58
5	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT	-
6	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKPN dan SPT Tahunan)	-

Kepala Balai Besar,



Dr. Hasan Abdullah Sanyata  
NIP. 197001102002121001